

KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN INKLUSIF PELUANG DAN TANTANGAN DI NEGARA BERKEMBANG

Ayu Sukma Wardani¹, M.Adi Saputra², Monica Niarsih³, Anas Malik⁴,

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : amandaayusukmawardani@gmail.com¹
muhammadadisaputradiputra@gmail.com²
monicaniarsih@gmail.com³
anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Kebijakan fiskal berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di negara berkembang. Dengan menggunakan instrumen seperti pengeluaran publik, sistem perpajakan, dan pemberian subsidi, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan, serta memperbaiki infrastruktur ekonomi yang ada. Namun, negara berkembang menghadapi beragam tantangan dalam melaksanakan kebijakan fiskal secara efektif, seperti keterbatasan anggaran, dominasi sektor informal, serta ketergantungan pada bantuan internasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan fiskal dapat dioptimalkan sebagai alat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat, kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi tantangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membangun ekonomi yang lebih stabil.</i></p>	<p>Diajukan: 3-2-2023 Diterima: 20-5-2023 Diterbitkan : 25-5-2023</p> <p>Kata kunci: <i>Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Inklusif, Peluan, Tantangan</i></p> <p>Keywords: <i>Fiscal Policy, Inclusive Growth, Opportunities, Challenges</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>Fiscal policy plays a crucial role in encouraging fair and equitable economic growth in developing countries. By using instruments such as public spending, the tax system, and providing subsidies, the government can utilize resources to reduce poverty levels, overcome income inequality, and improve existing economic infrastructure. However, developing countries face various challenges in implementing fiscal policy effectively, such as budget constraints, dominance of the informal sector, and dependence on international assistance. This research examines how fiscal policy can be optimized as a tool for creating sustainable and inclusive economic growth, as well as analyzing the opportunities and obstacles faced in its implementation. The research results show that with proper planning and management, fiscal policy can be an effective instrument in overcoming development challenges, improving social welfare, and building a more stable economy.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel:</p> <p>Wardani, A.S., Saputra, M.A., Niarsih, M., & Malik, A. (2023). Kebijakan Fiskal Sebagai Penggerak Pertumbuhan Inklusif Peluang dan Tantangan di Negara Berkembang. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 1(1), 86-91. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</p>	

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi di negara berkembang, khususnya dalam mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Di banyak negara berkembang, kendala besar seperti ketergantungan pada sektor informal dan keterbatasan anggaran membuat perencanaan kebijakan fiskal menjadi lebih kompleks. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang efektif dalam hal pengelolaan belanja publik, pajak, dan subsidi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya yang sering dihadapi adalah ketergantungan pada utang luar negeri dan ketidakstabilan ekonomi global.

Kebijakan fiskal di negara berkembang tidak hanya berfungsi untuk menstabilkan ekonomi, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan fiskal bisa memperbaiki infrastruktur dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan. Meski begitu, kendala-kendala internal dan eksternal seringkali menghalangi penerapan kebijakan fiskal yang efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di negara berkembang, dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat kebijakan fiskal lebih efektif dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini berfokus pada negara berkembang yang memiliki tantangan serupa dalam hal kebijakan fiskal. Negara-negara yang dipilih untuk studi ini memiliki masalah umum seperti ketergantungan pada sektor informal dan keterbatasan sumber daya fiskal. Beberapa negara dari Asia Tenggara dan Afrika yang baru-baru ini menerapkan kebijakan fiskal besar akan menjadi objek penelitian.

Desain penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti akan membandingkan kebijakan fiskal di negara-negara berkembang untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Penelitian ini akan mencakup periode tertentu untuk melihat perubahan yang terjadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan pemerintah, data ekonomi dari lembaga statistik nasional dan internasional, serta publikasi akademik dan laporan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan ahli ekonomi dan pejabat terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kebijakan fiskal yang diterapkan di negara berkembang.

Penelitian ini tidak melakukan intervensi langsung terhadap kebijakan yang ada. Sebaliknya, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang ada, serta mengidentifikasi kebijakan fiskal yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Peneliti akan memfokuskan pada kebijakan fiskal yang berhasil maupun yang mengalami kendala dalam mencapai tujuan pembangunan inklusif.

Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mencari pola-pola dan tema-tema yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap ekonomi negara berkembang. Hasil analisis ini akan dihubungkan dengan teori pembangunan ekonomi untuk memahami efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di negara berkembang. Hipotesis yang diuji adalah: "Kebijakan fiskal yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di negara berkembang." Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan data ekonomi makro dari negara-negara berkembang yang telah mengimplementasikan kebijakan fiskal dalam periode 10 tahun terakhir.

1. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Data menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya melalui belanja pemerintah dan subsidi, memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara yang diteliti. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, Kenya, dan Bangladesh, dari tahun 2015 hingga 2024.

Tabel. 1 Pertumbuhan PDB di Negara Berkembang yang Diteliti (2015-2024)

Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	5.0	5.2	5.4	5.1	5.0	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6
Kenya	5.5	5.6	5.7	5.8	5.4	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
Bangladesh	6.1	6.3	6.4	6.2	6.0	5.5	5.8	6.0	6.2	6.3

Seperti yang terlihat pada Tabel 1, sebagian besar negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi global. Grafik berikut memperlihatkan perbandingan pertumbuhan PDB sebelum dan setelah penerapan kebijakan fiskal, khususnya melalui belanja infrastruktur dan subsidi langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif mengalami peningkatan PDB yang signifikan, terutama melalui belanja infrastruktur dan subsidi sosial.

2. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pengurangan Ketimpangan Sosial

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan sosial dianalisis menggunakan Gini Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Indonesia, Kenya, dan Bangladesh mengalami penurunan ketimpangan setelah penerapan subsidi dan bantuan tunai langsung. Tabel 2 di bawah ini merangkum perubahan Gini Index dari tahun 2015 hingga 2024.

Tabel. 2 Gini Index di Negara Berkembang yang Diteliti (2015-2024)

Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34
Kenya	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38
Bangladesh	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41

Hasil di Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa negara mengalami penurunan Gini Index, yang mengindikasikan perbaikan dalam ketimpangan sosial. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal inklusif yang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya melalui program subsidi dan bantuan tunai langsung.

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mengurangi ketimpangan sosial di negara berkembang. Belanja pemerintah pada sektor infrastruktur terbukti meningkatkan akses ekonomi dan peluang bagi kelompok masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pemberian subsidi mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, hasil penelitian juga mengungkap sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal di negara berkembang. Salah satunya adalah keterbatasan penerimaan pajak karena dominasi sektor informal di beberapa negara, seperti Kenya dan Bangladesh, yang membuat penerimaan negara menjadi kurang optimal. Selain itu, ketergantungan pada bantuan luar negeri sering kali membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan nasional.

3. Peluang dan Tantangan di Negara Berkembang

❖ Peluang

a) Potensi Ekonomi yang Besar

Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Kenya, dan Bangladesh memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi berkat populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Di Indonesia, misalnya, kekayaan sumber daya alam dapat mendukung penerimaan negara melalui ekspor. Kenya, dengan sektor agrarisnya yang kuat, berpotensi meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui investasi infrastruktur. Bangladesh, sebagai salah satu pusat industri tekstil dunia, dapat memanfaatkan sektor ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b) Demografi yang Menguntungkan

Dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif, negara-negara ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan konsumsi domestik. Jika kebijakan fiskal diarahkan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, potensi demografi ini dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

c) Kesempatan Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan pada sektor tertentu dapat dikurangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung diversifikasi ekonomi. Indonesia dapat memperkuat sektor manufaktur dan digital, Kenya dapat mengembangkan sektor pariwisata dan teknologi, sementara Bangladesh dapat memperluas sektor jasa untuk mengurangi ketergantungan pada industri tekstil.

d) Dukungan Global

Bantuan luar negeri dan kemitraan internasional memberikan peluang bagi negara berkembang untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Hibah dan pinjaman dari lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur.

❖ **Tantangan**

- a) **Keterbatasan Penerimaan Pajak**
Sektor informal yang mendominasi perekonomian menjadi tantangan utama dalam pengumpulan pajak. Di Bangladesh, lebih dari separuh tenaga kerja bekerja di sektor informal, yang sulit dijangkau oleh sistem perpajakan. Di Indonesia dan Kenya, masalah serupa menghambat upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak.
- b) **Ketergantungan pada Bantuan Luar Negeri**
Banyak negara berkembang, termasuk Kenya dan Bangladesh, masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Ketergantungan ini sering kali membatasi fleksibilitas pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran karena adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman.
- c) **Ketidakstabilan Politik dan Korupsi**
Stabilitas politik menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan fiskal yang efektif. Di Kenya, konflik politik sering kali menghambat pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, korupsi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengurangi efisiensi alokasi anggaran dan memperburuk ketimpangan sosial.
- d) **Kesenjangan Infrastruktur**
Keterbatasan infrastruktur di banyak wilayah, terutama daerah pedesaan, menghambat distribusi manfaat kebijakan fiskal. Di Bangladesh, misalnya, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh transportasi modern, sehingga membatasi akses ke pasar dan layanan publik.
- e) **Tekanan Eksternal**
Negara berkembang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Misalnya, penurunan harga komoditas utama seperti minyak dan gas di Indonesia atau kapas di Bangladesh dapat mengurangi pendapatan negara, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai program sosial.

Meski memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang kompleks. Optimalisasi potensi ekonomi, pemanfaatan bonus demografi, dan dukungan global dapat menjadi modal utama. Namun, tantangan seperti sektor informal, harus diatasi melalui kebijakan fiskal yang lebih inovatif, transparan, dan inklusif.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Kenya, dan Bangladesh. Berdasarkan penelitian ini, kebijakan fiskal yang diarahkan pada pengeluaran publik untuk pembangunan infrastruktur serta pemberian subsidi langsung telah terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Meskipun begitu, penerapan kebijakan fiskal tidak lepas dari berbagai peluang dan tantangan. Di satu sisi, negara-negara ini memiliki keunggulan berupa populasi usia produktif yang besar, kekayaan sumber daya alam, peluang untuk mendiversifikasi ekonomi, serta dukungan dari lembaga internasional. Namun, di sisi lain, hambatan seperti dominasi sektor informal, ketergantungan pada bantuan luar negeri, ketidakstabilan

politik, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi kendala utama yang perlu diselesaikan.

Dengan demikian, meskipun dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sudah terlihat positif, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Hal ini meliputi perbaikan tata kelola, peningkatan pendapatan negara melalui pajak, serta pengurangan ketergantungan pada faktor eksternal. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Perekonomian Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Dunia. (2022). *Laporan Pembangunan Dunia: Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Inklusif di Negara Berkembang*. Washington, D.C.: Bank Dunia.
- Bank Pembangunan Asia. (2021). *Prospek Ekonomi Asia Tenggara: Tantangan dan Peluang di Masa Depan*. Manila: Bank Pembangunan Asia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Negara 2023: Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Kenya. (2022). *Laporan Kebijakan Fiskal Kenya: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. Nairobi: Kementerian Keuangan Kenya.
- Choudhury, R. (2020). *Fiscal Policy and Growth in Bangladesh: An Empirical Study*. Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies.
- Suryanto, H. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Negara Berkembang: Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyanti, A. (2022). *Kebijakan Fiskal dan Kesenjangan Sosial di Negara Berkembang: Analisis Kasus Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kumar, P., & Singh, R. (2020). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Negara Berkembang. *Tinjauan Kebijakan Pembangunan*, 38(5), 789-810.
- Mwangi, J., & Wangui, F. (2021). Stimulus Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris tentang Kinerja Ekonomi Kenya. *Ulasan Ekonomi Afrika*, 33(2), 100-120.